

Bambang Dan Yunus Kredibel Pimpin KPK

Ketua DPR Marzuki Alie menilai dua nama dari delapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Bambang Widjojanto dan Yunus Hussein cukup kredibel memimpin KPK.



Ketua DPR RI Marzuki Alie

“Kedua orang ini cukup layak memimpin KPK ke depan. Kalau dilihat dari rekam jeaknya yang ada di media, kita harapkan kinerjanya akan sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Marzuki Alie di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.(22/8)

Seperti diketahui Bambang Widjojanto adalah pengacara dan dosen, sedangkan Yunus Hussein saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Pusat Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Lebih lanjut menurut Marzuki, terhadap nama-nama calon lainnya dirinya tidak bisa memberikan penilaian karena tidak memiliki data-data dan tidak dalam kapasitas melakukan seleksi.



“Saya tidak tahu rekam jejak dan pengalaman mereka apa saja, pendidikan mereka apa, perjalanan karirnya seperti apa. Saya tidak punya data,” katanya.

Ia menambahkan, proses pemilihan pimpinan KPK itu tergantung pada hasil uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, yang akan dilaksanakan sesuai lebaran.

Sebelumnya, DPR RI telah menerima delapan nama calon pimpinan KPK dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kedelapan nama tersebut adalah, Bambang Widjojanto (pengacara), Yunus Hussein (Ketua PPATK), Abdullah Hehamahua (Penasihat KPK) dan Handoyo Sudrajat (Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan KPK). Sedangkan urutan kelima hingga kedelapan adalah Abraham Samad, Zulkarnain, Adnan Pandupraja, dan Aryanto Sutadi.

Dari delapan nama tersebut, nantinya Komisi III DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk memilih empat nama dari delapan calon pimpinan lembaga pemberantas korupsi tersebut.

Delapan nama tersebut dipilih oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan diurutkan berdasarkan peringkat terbaik.(nt)foto:parle

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; **FOTOGRAFER:** Eka Hindra **PENANGGUNG JAWAB FOTO:** Rizka Arinindy **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

Komisi VI DPR Sidak Pasar Modern BSD CITY

Ketua Tim Kunjungan spesifik Anggota Komisi VI DPR Agus Hermanto mengatakan bahwa, harga-harga dan suplainya barang kebutuhan pokok menjelang hari raya lebaran hingga saat ini masih lencer. Demikian yang dikatakan Agus Hermanto pada saat melakukan kunjungan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar modern Bumi Serpong Damai City, Tangerang Baten, Senin, (22/8) pagi.



Anggota Komisi IV DPR RI Agus Hermanto saat melakukan kunjungan inspeksi mendadak ke pasar modern Bumi Serpong Damai, BSD City, Tangerang Banten

Ketua Tim Agus Hermanto juga menambahkan, semuanya juga berjalan sesuai apa yang diminta. Hal ini masih memiliki nilai tambah, karena kita tidak impor daging secara langsung seperti yang dilaksanakan hari-hari sebelumnya begitupun juga beras, kenaikannya masih bisa ditolerir dikarenakan kenaikannya yang hanya sedikit sekali dengan kenaikan berkisar dari 5% hingga 10%, ungkap Agus H.

Dia menambahkan, hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah permintaan sehingga terjadi kenaikan pada suplai juga, namun selama masih terjangkau kenaikan tersebut juga dapat dikendalikan hingga saat ini, sementara kenaikan bahan-bahan pokok masih wajar, dan Insya Allah rakyat masih terjangkau dan rakyat Insya Allah tidak ada gejolak ekonomi mendatang, tandasnya.

Agus Hermanto juga menekankan, jika memang ada kenaikan harga maka kami akan memanggil bulog untuk bagaimana masa suplainya, juga akan memanggil kementerian perdagangan dalam mencari upaya dan solusi, tetapi karena suplainya mencukupi dengan wajar, dan nanti kami akan mengklarifikasi saja data yang kami miliki dengan mencocokkan data yang dimiliki ada di kementerian perdagangan sudah sesuai apa belum, sehingga dalam RDP selanjutnya dapat ditindak lanjuti.”

Ketua Tim saat ditanya apakah nantinya akan ada operasi pasar, dia mengatakan bahwa operasi pasar memang akan betul-betul dilakukan bila memang betul-betul darurat, yaitu dalam keadaan kekurangan suplai dan harga yang tidak terkendali. Namun saat ini harga masih terkendali sehingga apabila ada kenaikan harga

masih dapat ditolerir, memang ini bukan dalam titik tertinggi, mudah-mudahan sebelum sampai hari ini tak ada gejolak yang tinggi, mudah-mudahan kebelakang bisa lencer, kata Agus Hermanto.

Sementara itu, pedagang daging sapi dan ayam Suhadi mengatakan bahwa selama bulan suci ramadhan harga daging sapi melonjak naik dari enam puluh lima ribu menjadi tujuh puluh lima ribu, sementara daging ayam masih tetap stabil berkisar antara 30 ribu hingga 40 ribu rupiah.

Suhadi meminta kepada Anggota Komisi VI DPR agar tetap menjaga harga-harga kebutuhan pokok selama bulan suci ini jangan sampai naik, menurutnya dengan adanya kenaikan barang juga akan menyusahakan para pedagang juga, ungkap Suhadi. (Spy)foto:spy

Sekjen DPR Salurkan Zakat yang Telah Dihimpun UPZ MPR-DPR-DPD

Petugas kebersihan taman di kompleks Perlemen, Senayan, Jakarta tersenyum lebar karena menjelang Lebaran 1432 H. mendapatkan tambahan penghasilan yang berasal dari zakat profesi yang dihimpun oleh Unit Pelayanan Zakat (UPZ) MPR/DPR/DPD.



Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh menyerahkan zakat infaq kepada salah satu petugas kebersihan taman Gedung DPR RI

“UPZ mengelola titipan para muzaki yang terdiri dari anggota dan karyawan DPR/MPR/DPD. Uang ini kita serahkan kepada para mustahik, petugas kebersihan taman yang memang layak memperolehnya.” jelas Nining Indra Saleh, sekjen DPR yang memimpin acara penyerahan di ruang Pansus C, Kamis (25/8/11).

Ia menambahkan penyaluran zakat ini yang ketiga kali sejak UPZ didirikan di kompleks gedung parlemen, Senayan. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan para muzaki yang cukup banyak jumlahnya menyerahkan zakat/infaq/shadaqahnya dan selanjutnya disalurkan kepada mustahik yang memerlukan.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan, UPZ bekerjasama dengan Setjen mulai tahun ini akan memulai metode baru penghimpunan zakat dengan langsung melalui bendaharawan gaji. “Tentunya apabila ada pernyataan kesanggupan dari muzaki

bersedia langsung dipotong gajinya. Harus tanda tangan surat kesediaan dulu ya,” tambah Nining. Pendekatan baru ini akan memudahkan dan diharapkan meningkatkan pemasukan UPZ sehingga dapat berbuat lebih banyak membantu pihak-pihak yang masuk kategori tidak mampu.

Selama ini para muzaki harus pro aktif menyerahkan zakatnya ke kantor UPZ di belakang kantor Pos cabang DPR RI atau menyetor langsung ke rekening Bank Mandiri. Hasil evaluasi menunjukkan mekanisme pelayanan ini belum berhasil meningkatkan jumlah muzaki, bahkan ada kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada bagian lain Sekjen DPR memberikan ucapan selamat kepada 70 orang petugas kebersihan taman di gedung parlemen. Ia secara khusus memberikan apresiasi karena berhasil mendukung kinerja anggota dan karyawan MPR/DPR/DPD dari luar gedung, dengan menata dan menjaga

taman tetap bersih dan asri. “Saya sering olah raga pagi dan berinteraksi dengan teman-teman yang sudah berada di lapangan yang cukup berat ya, apalagi siang disengat matahari, hujan, angin dan polusi,” imbuhnya.

Sementara itu Sukarja petugas kebersihan mengaku senang dan bersyukur mendapat tambahan menjelang lebaran. “Saya akan gunakan untuk membayar zakat fitrah anak dan istri saya yang sampai hari ini belum,” ujarnya sambil menimbang-nimbang amplop putih yang baru saja diterimanya.

Sedangkan Subakhir yang tinggal di Parung Panjang sambil tersenyum mengatakan akan menggunakan uang yang baru saja diterimanya untuk belanja persiapan menyambut Idul Fitri yang akan segera tiba. Dengan langkah tegas dan masih mengenakan pakaian kerja berwarna biru, ia pamit untuk kembali melanjutkan pekerjaan menjaga keasrian taman di halaman gedung parlemen. (iky) foto:iky

Ketua DPR Hadiri Malam Munajat Lailatul Qadar Masyarakat Sambas, Kalbar

Mesjid Agung Jami Sultan Muhammad Shafiuddin II, salah satu bangunan bersejarah di kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dipenuhi warga masyarakat mengikuti Malam Munajat Lailatul Qadar, Sabtu (20/8/2011).

“ Kita bermunajat pada 10 malam terakhir Ramadhan sekaligus menyambut datangnya malam Lailatul Qadar yang diperkirakan datang pada malam-malam ganjil. Semua pasti berharap mendapatkannya karena bernilai lebih baik dari seribu bulan,” kata Ketua DPR RI Marzuki Ali mengawali pidatonya.

Akan tetapi ia berharap jamaah yang hadir pada malam itu bukan hanya fokus pada 10 hari terakhir tetapi sudah mampu menjaga kualitas ibadahnya sejak awal Ramadhan. Rahmat, maghfirah dan mendapatkan malam Lailatul Qadar menurutnya hanya diperoleh hamba-NYA yang konsisten beribah.

Ketua DPR juga memberikan apresiasi kepada tekad pemerintah daerah yang ingin menjadikan Sambas sebagai Bumi Serambi Mekah. Namun ia berpesan agar program yang diiringi upaya melahirkan seribu dai itu dipersiapkan dengan baik. Program pendidikan yang tersebar di beberapa pesantren agar memberikan bekal yang seimbang.

“Calon da'i jangan hanya diberikan pendidikan agama sedangkan pelajaran menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi serta kewirausahaan dilupakan,” imbuhnya. Banyak kasus para dai setelah menyelesaikan pendidikan di Ponpes tidak bisa mensejahterakan diri sendiri apalagi kalau ditambah beban mensejahterakan orang lain.

Sebagian bahkan tidak dapat mengajar mengaji, bukan karena tidak mampu tapi karena sebagian besar masyarakat berpandangan belajar ngaji itu gratis, tidak perlu bayar mahal. Orang tua lebih rela membayar dengan harga tinggi kursus bahasa Inggris. “Apabila kondisi ini tidak diperhatikan program itu bisa terjebak menjadi pusat kemiskinan baru,” kata Marzuki mengingatkan. Para da'i perlu diberikan pengetahuan kewirausahaan, supaya jangan sampai berdak-



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat memberikan ceramah di Masjid Agung Jami Sultan Muhammad Shafiuddin II, Sambas, Kalimantan Barat

wah mengharap amplop. Sehingga martabat para pendakwah ini bisa betul-betul terangkat, tidak terangkat karena amplop.

Lebih jauh Ketua DPR menambahkan ia siap memperjuangkan program yang sedang dikembangkan pemerintah di daerah asalkan mampu menjaga komitmen dan tidak korupsi. Baginya optimalisasi potensi daerah yang paling utama adalah menggunakan potensi itu dengan cerdas dan menguntungkan masyarakat. Ini dapat dimulai dengan tidak mempersulit investor yang ingin masuk.

Ia juga memberikan contoh kegagalan pemerintah di daerah lain ketika membangun tidak mengedepankan kepentingan rakyat. “Ada bupati yang mengoleksi puluhan mobil atau di daerah lain menjual seluruh konsesi pertambangan kepada swasta tidak ada yang disisakan untuk daerah, semuanya berujung kegagalan, rakyatnya berteriak” katanya.

Sesuatu itu akan berakhir pada saatnya kalau Allah SWT menghendaki, jadi para pemimpin tidak perlu khawatir dijatuhkan asalkan bekerja mengedepankan rakyat. “Makanya su-

ara saya terkadang berbeda dengan kebanyakan orang. Tidak apa sepanjang itu untuk kepentingan rakyat, soal citra tidak ada urusan. Nilai kita akan ditulis Allah, bukan manusia,” demikian Marzuki.

Dalam kesempatan itu Ketua DPR berkesempatan melihat mesjid bersejarah yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Shafiuddin II tahun 1885. Masjid yang berada di selatan alun-alun kesultanan ini seluruh bangunannya terbuat dari kayu, terdiri dari dua tingkat disangga delapan tiang dari kayu belian berukuran besar.

Ketua DPR didampingi Bupati Sambas Juliarti Djuhardi Alwi juga melihat bangunan kesultanan serta monumen tiang kapal. Dua tiang penyangga pada sisi kiri dan kanan tiang melambangkan dalam menjalankan roda pemerintahannya Sultan selalu didampingi oleh Ulama dan Khatib. Bupati yang juga dokter perempuan ini menyebut disekitar area ini gugur pahlawan Sambas, Tabrani Ahmad yang ditembak penjajah Belanda saat mempertahankan merah putih. (iky) foto: ik/parle

Komisi V Terima Kunjungan Parlemen dan Dubes Jerman

Ketua Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow beserta sejumlah anggota Komisi V menerima kunjungan resmi rombongan Parlemen dan Duta Besar Jerman Nobert Baas di ruang Rapat Komisi V, Rabu Sore, (24/8).



Ketua Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo (kanan) saat menerima kunjungan Parlemen Jerman

Kunjungan Parlemen Jerman yang didampingi Dubes Jerman untuk Indonesia tersebut bertujuan untuk bertemu langsung dengan anggota Komisi V DPR yang membicarakan masalah infrastruktur.

“Terima kasih kami diberikan waktu untuk bicara dan bertemu dengan anggota DPR, saya pikir permasalahan infrastruktur adalah permasalahan kita bersama dimana semua Negara memiliki permasalahan infrastruktur, terutama masalah anggaran yang memerlukan dana yang cukup besar,” kata Dirk Fischer selaku anggota parlemen Jerman dalam menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya ke Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi V mengapresiasi kedatangan Anggota Kedubes Jerman dan parlemennya.

Yasti menjelaskan, menyangkut kebijakan infrastruktur di Indonesia, kendala yang dihadapi adalah masalah pendanaan infrastruktur baik darat, laut, dan udara. Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang begitu besar jumlahnya kurang lebih 17.000 pulau

yang tersebar di seluruh Indonesia. Dapat dikatakan Indonesia merupakan negara maritim dan membutuhkan transportasi laut yang handal, dimana saat ini Pemerintah baru mulai membangun kurang lebih 2.600 pelabuhan. Jika dilihat dari jumlah pulau 17.000, jumlah pelabuhan yang ada masih jauh sekali.

Hal tersebut memicu pertanyaan dari salah satu anggota Parlemen Jerman yang mengatakan bagaimana cara menghubungkan pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia, apakah menggunakan kapal feri,” tanya Uwe Karl Beckmeyer.

Terkait pertanyaan tersebut, Yasti menjelaskan bahwa memang sangat diperlukan infrastruktur laut.” Kami sudah ada beberapa pelabuhan yang dibangun dari beberapa ribu pulau yang ada di Indonesia tapi Indonesia tersangkut di masalah anggaran” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi V Muhidin M. Said menambahkan, untuk masalah anggaran di bidang infrastruktur ini, tentunya pemerintah Indonesia sangat membutuhkan bantuan dari Pemerin-

tah Jerman baik untuk Infrastruktur darat, laut, maupun udara. Namun, katanya, kami lebih mengarah ke infrastruktur laut karena Indonesia adalah Negara Maritim dan merupakan pertemuan empat selat yang menjadikan Indonesia pusat lalu lintas kapal-kapal.

Sementara Claudia Wintersteiny yang merupakan Panitia Anggaran Parlemen Jerman juga menanyakan berapa persentasi keseluruhan anggaran APBN yang disediakan Indonesia untuk transportasi.

Menjawab pertanyaan tersebut Yasti mengatakan bahwa saat ini Indonesia hanya menyiapkan 36,6 persen. Namun dia berharap ke depan anggaran tersebut dapat terus ditingkatkan.

Yasti juga menjelaskan bahwa sudah ada kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman, dalam hal ini Kementerian Perhubungan Indonesia dan Jerman menyangkut perkeretaapian di Indonesia. “Kami selaku anggota DPR menyambut baik dan itu adalah satu solusi pemerintah untuk bisa meringankan beban negara dalam hal transportasi nasional,” jelasnya. (lvs,ie,tt)foto:parle

DPR Minta Pemerintah Pastikan Stok Sembako Aman

Komisi VI DPR RI meminta pemerintah memastikan stok dan harga sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) menjelang Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah dalam kondisi aman dan stabil.



Jati. Buah-buahan dan sayuran yang banyak di pasaran diantaranya adalah, jahe, wortel, kentang, bawang, jeruk, anggur dan pisang impor.

Bahkan Komisi VI DPR juga menemukan ada jeruk yang diimpor dari Uruguay, Amerika Selatan. Sayuran impor seperti kentang impor harganya Rp 5.500 per kg, sedangkan kentang lokal Rp 7.000 per kg. Begitu juga jahe impor Rp11.000 per kg dan jahe lokal Rp 12.000 per kg serta wortel impor Rp 4.000 per kg dan wortel lokal Rp 5.000 per kg.

“Buah dan sayuran impor itu jika dijual di pasar modern tidak jadi masalah, tetapi kalau dijual di pasar tradisional, maka akan mempersulit petani dan pedagang sayur atau buah skala kecil,” katanya.

Menurut Airlangga, produk impor yang masuk ke pasar Indonesia sulit dicegah karena merupakan kebijakan pemerintah untuk menekan laju inflasi. Namun, untuk produk buah dan sayur banyak diproduksi petani yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Jadi, semestinya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian bisa membuat aturan yang lebih baik.

“Kementerian Pertanian hendaknya tidak hanya mengatur hasil produksi pertanian, tetapi juga distribusinya. Ini harus dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan,” katanya.

Menurut dia, harga buah dan sayur impor lebih murah daripada buah dan sayur lokal. Ini kemungkinan karena harga di tingkat petani lokal sudah tinggi dan biaya distribusi juga tinggi. Buah dan sayuran impor yang banyak ditemukan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, sendiri banyak berasal dari China dan Thailand. (Tim Parle)

Demikian dikatakan Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto bersama sejumlah anggota Komisi VI DPR saat melakukan Sidak ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (22/8).

Sidak menjelang Lebaran ini dilakukan untuk memantau stok dan perkembangan harga sembako di pasaran. Selain ke Pasar Kramat Jati, sejumlah anggota Komisi VI lainnya juga melakukan Sidak ke Pasar Modern Bumi Serpong Damai City, Tangerang Banten.

Airlangga mengatakan, harga sembako di pasar tradisional di Jakarta saat ini memang relatif stabil, namun harganya masih tinggi. Untuk itu, katanya, dari produksi di tingkat petani dan distribusi ke pasar induk harus berjalan lancar.

Menurut dia, dari pantauan pasokan serta harga beras dan sayur mayur di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta,

diperkirakan hingga H-8 menjelang Idul Fitri 1432 Hijriah masih relatif cukup dan stabil. Stabilitas bisa terjaga karena panen di tingkat petani dan distribusi ke pasar induk berjalan lancar. Namun kondisi ini harus dijaga karena lonjakan harga biasanya terjadi pada H-3 hingga H-1 Lebaran.

“Kalau ada kenaikan harga pada H-3 hingga H-1 Lebaran, ini dikarenakan dijadikan peluang bagi para pedagang untuk meraih keuntungan lebih yang memang terjadi setahun sekali. Jadi, jika ada kenaikan harga, saya pikir tidak signifikan, namun pemerintah tetap harus melakukan pengawasan,” ujarnya.

Maraknya Buah Impor

Sementara itu, saat melakukan peninjauan ke pasar, Komisi VI DPR juga menemukan banyaknya buah dan sayuran impor di Pasar Induk Kramat

Kemandirian Pangan Diabaikan oleh Pemerintah

Anggota DPR Komisi IV Ma'mur Hasanuddin mengatakan, perhatian pemerintah terhadap kemandirian pangan bukan menjadi sebuah program utama dari pemerintah sekarang ini.



Anggota Komisi IV DPR RI Ma'mur Hasanuddin

“total nilai impor pangan Indonesia senilai US\$5,36 miliar atau setara dengan 45 Triliun sepanjang Januari hingga Juni tahun 2011 masih akan terus merangkak naik hingga akhir tahun jika sumber munculnya kebijakan impor ini tidak di padamkan,” jelas politisi dari PKS ini.

Menurutnya, saat ini pemerintah berpersepsi yang penting stok cukup, tanpa peduli dari mana stok tersebut di dapat. Indonesia, lanjutnya, hingga saat ini telah melakukan impor atas 28 komoditi pangan yakni beras, jagung, kedelai, gandum, terigu, gula pasir, gula tebu, daging sapi, daging ayam, mentega, minyak goreng, susu, bawang merah, bawang putih, telur, kelapa, kelapa sawit, lada, teh, kopi, cengkeh, kakao dan cabai.

Ma'mur menilai, perilaku impor yang di fasilitasi negara ini seolah-olah

mengarahkan bangsa ini menjadi bangsa pemakan tanpa mesti melakukan produksi yang dapat memenuhi kebutuhan untuk dalam negeri sendiri.

Semua komoditi pangan yang telah diimpor, menurut Ma'mur, dapat dikembangkan di Indonesia secara mandiri tanpa harus mengandalkan produk dari luar. “Semua produk pangan yang di impor ini dapat tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia, tapi anehnya pemerintah kok malah impor-impor terus,” keluhnya.

Dia menambahkan, persoalan juga terkait masalah garam, dimana komoditi ini dapat mendukung industri pangan nasional, dan masih terlihat adanya mafia di kementerian perdagangan

“Mafia impor di negeri ini bukan

hanya garam, hampir semua produk pangan pun dapat di indikasikan ada mafianya, buktinya, begitu mudahnya aturan dibuat, melarang impor tidak lama kemudian melanggar kebijakan impor yang telah dibuat. Yang paling nyata, 28 komoditas pangan ini beredar bebas di negara ini,” jelasnya

Untuk menyelesaikan hantu impor yang terus berkeliaran di negeri ini, Ma'mur Hasanuddin yang juga anggota panja RUU Pangan ini meminta dengan tegas kepada presiden untuk memadamkan sumber impor pangan tersebut, dengan mengganti menteri perdagangan dengan orang yang berpihak kepada sumber daya lokal terutama produk pertanian dan peternakan.

“Sumber utama hantu impor ini ada di menteri Perdagangan, Presiden sebaiknya mengganti menteri satu ini dengan orang yang berpihak kepada petani lokal, sehingga tidak seenaknya mengeluarkan kebijakan impor dengan alasan yang penting stok aman,” tegasnya. (si)foto:si



Pasar tradisional

DPR Minta Pemerintah Kembali Prioritaskan Program KB

Wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan program keluarga berencana pembangunan keperempuanan harus kembali diprioritaskan dan menjadi program utama Pemerintah saat ini.

Selain itu, Priyo mengharapkan, DPR juga harus memfokuskan titik sentrum perhatiannya terhadap program perempuan yang selama ini terabaikan.

“DPR merasa gusar dalam 10 tahun terakhir perkembangan pembangunan berkelanjutan khususnya perlindungan terhadap perempuan kurang diprioritaskan, dahulu pada era Orba, Indonesia mendapatkan award internasional sebagai pelopor program keluarga berencana nasional, bahkan selama dekade dapat dikurangi sampai rentangan 100 juta jiwa,” jelas Priyo saat menerima Parlemen Uni Eropa yang dipimpin oleh anggota parlemen dari Austria Petra Bayr, di Gedung Nusantara III, Senin, (22/8).

Menurutnya, kelalaian itu disebabkan, Indonesia masih membangun tatanan politik baru di tanah air. Saat ini pada era reformasi demokrasi Indonesia sudah mendekati demokrasi ala Yunani kuno.

Amerika Serikat, paparnya, yang disebut sebagai kampion demokrasi telah dikalahkan oleh Indonesia. Saat ini, bangsa Indonesia telah menjalankan praktek demokrasi paling demokratis sedunia. Mulai dari Presiden, wakil rakyat, Gubernur, Bupati, Walikota bahkan kepala desa melakukan Pemilu langsung (one man one vote)

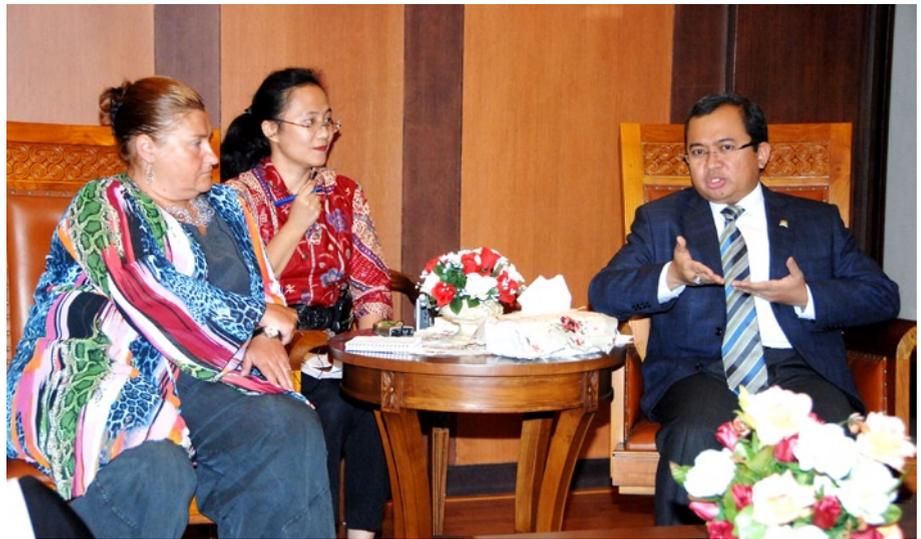
Sementara anggota DPR Okky asokawati dari PPP mengatakan, DPR telah memberikan perhatian penuh di bidang kesehatan reproduksi dengan menambah 1 bab yang terdiri dari beberapa pasal. Sementara pada tahun 2009 pasal tentang reproduksi hanya 1 pasal saja.

Terkait bidan, jelasnya, memang banyak perempuan di Indonesia yang lahir tanpa dibantu oleh tenaga kesehatan yang memiliki sertifikasi yaitu dengan bantuan dukun. Hal itu beraki-

bat meningkatnya kematian ibu dan bayi dipedesaan.

Pemerintah, paparnya, telah mengeluarkan kebijakan baru Jampersal, yang bertujuan meningkatkan potensi

kelahiran bayi dan keselamatan ibu . “Saat ini banyak juga dukun yg biasanya mengurus kelahiran bekerjasama dengan bidan. Perempuan yg biasa dengan dukun, secara psikologis mengalami kegamangankarena itu diharapkan semakin terbiasa dengan tenaga kesehatan yang ada,” paparnya. (si) foto:as/parle



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso (kanan) saat menerima Parlemen Uni Eropa yang dipimpin oleh anggota parlemen Austria Petra Bayr





Putih Bersih Kembali Fitri



**Seluruh Staf dan Karyawan Keluarga Besar
Sekretariat Jenderal DPR RI
Mengucapkan Selamat
idul fitri**

1 Syawal 1432 H

Minal Aidin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Bathin

Pemerintah Dituntut Prioritaskan Pelayanan Transportasi Publik

Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal mengatakan, Peningkatan jumlah pemudik yang diprediksi mencapai 15,44 juta penumpang pada Lebaran kali ini harus diikuti dengan peningkatan pelayanan transportasi public. Selain factor keamanan, factor keselamatan dan kelaikan angkutan juga harus menjadi perhatian.

Menurutnya, faktor kelaikan angkutan, keselamatan dan keamanan penumpang kerap diabaikan saat puncak arus mudik. Tak heran bila angka kecelakaan pada saat mudik lebaran, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

“Jika melihat proporsi peningkatan pemudik dengan motor yang mencapai 56,35% dan mobil 30,78%, Kami khawatir angka kecelakaan lalu lintas sulit ditekan. Apalagi sepeda motor terbukti penyumbang penyebab kecelakaan lalu lintas terbesar, sisanya bus, truk dan container,” ungkapnya.

Ketua Bidang Kebijakan Publik DPP PKS ini mengatakan, selama tahun 2009—2010, kinerja kementerian perhubungan belum menunjukkan perbaikan pelayanan transportasi. Dibidang transportasi darat, angka kecelakaan masih tinggi. Sebagai contoh pada penyelenggaraan mudik tahun 2010, H+3 pascালেbaran 2010 telah terjadi 1.098 kecelakaan lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia. Kerugian materi diprediksi mencapai Rp 4,17 miliar. “Meski jumlah kecelakaan menurun ditahun 2010, namun nilai kerugian materi meningkat lebih dari 100%”. jelasnya.



Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal

Menurut Kamal, sampai saat ini pelaksanaan 4 paket UU transportasi yaitu UUNo.23/2007 tentang Perkertaapian, UU No. 17/2008 tentang Pelayaran, UU No. 1/2009 tentang Penerbangan dan UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan (LLAJ) masih jalan ditempat. “Berbagai amanat keempat UU tersebut seperti pembuatan peraturan turunan, pembentukan badan dan amanat untuk au-

dit belum dilaksanakan”, lanjut salah satu politisi muda di parlemen ini.

Untuk itu, legislator dari daerah pemilihan Sumatera Selatan ini mendesak pemerintah untuk meningkatkan perannya dalam membina penyelenggaraan transportasi meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan, sebagaimana diamanatkan oleh keempat UU transportasi tersebut. (si) foto:si

DPR Pertanyakan Antrean Truk Di Merak

Komisi V DPR RI yang datang ke Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Senin, mempertanyakan antrean truk yang sering terjadi di pelabuhan itu, hingga di dalam tol.

“Ini yang menjadi pertanyaan kami, kenapa di saat menjelang Lebaran kapal yang beroperasi bisa mencapai 40 unit, tetapi sebelumnya hanya 28 kapal saja,” kata ketua rombongan Komisi V DPR RI Nursyrwan Soedjono, saat melakukan pertemuan dengan PT ASDP Indonesia Ferry di ruang rapat VIP ASDP Cabang Utama Merak.

Menurut Nursyrwan Soedjono, semestinya pihak ASDP Indonesia Ferry mempertahankan jumlah kapal yang beroperasi, sehingga tidak terjadi antrean yang cukup panjang dan lama di luar Pelabuhan Merak.

Hal senada diungkapkan oleh anggota Komisi V lainnya, Hikmat Tomet. Menurut dia, semestinya pihak ASDP melakukan upaya evaluasi atas antre-

an kendaraan yang terjadi.

“Kami berharap ada evaluasi, dan menjadi bahan pemikiran, karena ASDP adalah pelayanan masyarakat, bukan hanya Lebaran saja. Karena saya sudah cek akibat antrean truk,” katanya.

Bahkan dirinya telah melakukan upaya audit Kementerian Perhubungan oleh BPK, atas anggaran yang

berhubungan dengan kinerja yang dilakukan oleh PT Indonesia Ferry selama ini.

“Upaya ini juga sudah kami lakukan kepada Kementerian PU, dan alhamdulillah setelah dilakukan audit, ada perubahan. Dan perubahan ini juga harus dilakukan oleh ASDP,” katanya.

Akibat antrean yang terjadi selama ini, banyak kerugian dan dampak sosial

yang terjadi oleh masyarakat sekitar.

“Mulai kerugian dari rumah makan, SPBU, saya punya data. Kenapa saya punya data, karena istri saya adalah Gubernur Banten. Dan kalau saya sekarang panggil Wali Kota Cilegon, pasti datang ke Pelabuhan Merak,” katanya.

Sementara itu, Direktur Usaha Pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry,

Prasetya B Utomo menjelaskan, apa yang menjadi evaluasi dari DPR RI, menjadi masukan bagi ASDP.

“Kami berusaha memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna jasa transportasi laut, sehingga antrean truk tidak terjadi di Pelabuhan Merak, masukan ini akan kami sampaikan secara tertulis,” kata Prasetyo. (nt) foto: nt/parle

Komisi V Minta Polisi Tertibkan Truk Bermuatan

Ketua Komisi V DPR RI, Nusyirwan Soejono, meminta kepada Kepolisian Daerah (Polda) Lampung untuk menertibkan truk bermuatan berat melebihi tonase karena memicu kerusakan di sepanjang jalan lintas Sumatera di provinsi tersebut.



Polisi saat sedang menertibkan truk yang bermuatan melebihi kapasitas

“Jika truk muatan berat tidak ditingkatkan maka berapa pun ‘budget’ yang dikeluarkan pemerintah untuk perbaikan infrastruktur tidak akan membuahkan hasil,” katanya di Gedung ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni, Provinsi Lampung, Senin. saat meninjau kesiapan angkutan mudik di Pelabuhan Bakauheni itu, bersama lima anggota Komisi V lainnya.

la menjelaskan, jika muatan truk

tidak dibatasi, maka infrastruktur jalan akan lebih cepat rusak meskipun sering diperbaiki setiap tahun dengan anggaran pemerintah pusat tersebut. “Jika peraturan ini tidak ditegakkan maka kondisi jalan akan hancur-hancuran,” imbuhnya.

Selain itu, katanya, hal tersebut merupakan koreksi bagi pihak kepolisian agar melaksanakan peraturan pembatasan muatan truk tersebut dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Kapolda Lampung Brigjen Pol Sulistyio Ishak mengutarakan, untuk pembatasan beban muatan, saat ini hanya mengandalkan Dinas Perhubungan melalui jembatan timbang yang sifatnya “stasioner”.

Oleh karena itu, untuk pembatasan tersebut pihaknya membutuhkan alat pengukur muatan kendaraan yang sifatnya dapat digunakan dengan mudah dan dapat dibawa kemana pun tanpa kesulitan “portable”.

Dia mengakui, bahwa sebagian besar kendaraan yang melalui jalan lintas Sumatera memiliki muatan melebihi tonase sehingga membuat badan jalan cepat rusak meskipun baru diperbaiki.

Bahkan, katanya, akibat beban melebihi tonase tersebut banyak jembatan timbang yang tidak mampu lagi menampung dan terpaksa sopir memberikan uang kepada oknum petugas timbang “ngemel” agar tetap diizinkan melintas.

Kapolda menambahkan, untuk kedepannya jika mendapatkan kendaraan truk bermuatan melebihi tonase maka akan dilarang melintas di jalan Lintas Sumatera dan akan di suruh kembali menyeberang ke Pelabuhan Merak.

“Jika tidak dilakukan kebijakan tersebut petugas tidak mungkin mengurangi muatan yang ada dalam truk tersebut,” katanya. (nt)foto:nt/parle

Keterwakilan Kepolisian dan Kejaksaan di KPK Tidak Mutlak

Seorang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memiliki independensi, keberanian dan integritas dalam melawan kejahatan luar biasa korupsi yang telah menggerogoti negeri ini. Memperhatikan kriteria itu keharusan keterwakilan unsur kejaksaan dan kepolisian pada jajaran pimpinan KPK tidak mutlak.



Anggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding



Ketua Komisi III DPR RI Benny K. Harman

“ Yang paling penting adalah orang yang memiliki kemampuan membangun komunikasi, bisa saja ia berasal dari luar kepolisian dan kejaksaan. Selama ini fungsi koordinasi dan supervisi sama sekali tidak berjalan, walaupun ada unsur kepolisian dan kejaksaan dalam pimpinan KPK saat ini,” kata Syarifuddin Sudding anggota komisi III di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/11).

Terkait penetapan ranking delapan orang calon pimpinan KPK yang dikirimkan panitia seleksi, politisi dari partai Hanura menganggapnya sebagai masukan, sama seperti berkas proses seleksi yang juga dikirimkan kepada DPR. “Saya tekankan sekali lagi DPR tidak terpengaruh dengan nomor peringkat yang dibuat panitia seleksi,”

tandasnya.

Pada bagian lain Syarifuddin Sudding memberikan apresiasi kepada kandidat pimpinan KPK Bambang Widjojanto. Catatan positif yang diberikan pada Bambang adalah ketika ia menolak tawaran Presiden menjadi anggota Komisi Kejaksaan setelah gagal dalam fit and proper test calon pimpinan KPK di DPR.

Secara pribadi ia mendukung terpilihnya praktisi hukum ini untuk menjadi pimpinan institusi pemberantas korupsi empat tahun kedepan. “Kalau sikap resmi fraksi belum karena masih menunggu pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan,” tambahnya.

Bicara pada kesempatan berbeda Ketua Komisi III DPR RI Benny K. Harman menjelaskan proses uji kepatutan dan kelayakan delapan

calon pimpinan KPK akan dilakukan setelah ada penugasan resmi dari Badan Musyawarah. “Setelah lebaran nanti seluruh proses di Bamus dan kemudian fit and proper test di Komisi III dimulai, jadi tunggu saja,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Delapan nama calon pimpinan KPK sebelumnya telah diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada DPR. Dalam fit and proper test dipilih empat orang dan bersama Busyro Muqoddas yang telah terpilih berdasarkan putusan MK akan memimpin KPK selama empat tahun kedepan. Kedelapan nama kandidat tersebut adalah Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, Handoyo Sudrajat, Abraham Samad, Zulkarnain, Adnan Pandupraja, dan Aryanto Sutadi. (iky) foto:iky/parle

Beras dan Gula Impor Penuhi Gudang Bulog Jakarta

Tim Komisi IV DPR RI menemukan ribuan ton beras dan gula impor di gudang Dolog Jakarta Raya di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara, saat melakukan Kunjungan Spesifik terkait persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1432H.

Tim yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, E. Herman Khairon ini, melakukan kunjungan ke sejumlah gudang Bulog, pasar induk dan pasar tradisional di Jakarta dan Jawa Barat, untuk melihat dari dekat ketersediaan stok pangan dan fluktuasi harga menjelang hari raya Idul Fitri tahun ini.

Persediaan beras dan gula putih menjelang dan pasca lebaran dinyatakan aman, karena adanya stok impor dari Vietnam dan Thailand, serta gula dari India.

“Kami cukup kaget melihat gudang Bulog ini, betapa tidak, seluruh gudang dipenuhi beras impor dari Vietnam dan Thailand dan tidak ada satupun beras dari produk hasil panen petani lokal,” kata Herman Khairon. Anggota Komisi IV Siswono Yudho Husodo menambahkan, selain beras yang berasal dari Vietnam dan Thailand, gula yang ada di gudang pun merupakan hasil impor dari India. “Seharusnya Bulog bisa menaikkan pembelian produk

lokal setiap tahunnya,” ujar Siswono menyarankan.

Wakil Kepala Perum Bulog Divre Jakarta Hani Sudiarto mengatakan, sampai bulan Agustus 2011 persediaan beras di gudang Bulog sebanyak 159 ribu ton untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, termasuk beras premium dan beras miskin (raskin). “Stok ini cukup untuk 58 bulan,” kata Hani. Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Divre Jakarta, Agusdin Farid menjelaskan, Gudang Dolog DKI merupakan penyangga Jawa Barat dan Banten. Selain itu Bulog Divre DKI Jakarta juga kerap melakukan pengiriman ke Pontianak Kalbar, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Padang Sumbar.

Farid mengungkapkan, dalam rangka Idul Fitri 1432H ini, Bulog juga melakukan Operasi Pasar (OP) sejumlah titik. “Beras OP tersalur 11.000 ton untuk satu bulan pada harga 6.100 per kg,” jelasnya. Farid menambahkan, untuk beras raskin sudah tersalur 32.518.800 kg untuk 180.600 Rmah

Tangga Sasaran (RTS).

Saat ditanya Tim Komisi IV mengapa mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand, Farid menjelaskan alasan membeli beras dari luar, karena harganya lebih murah ketimbang beras lokal. “Perbedaan harga sekitar 20 dolar per ton-nya,” ujarnya. “Kami tidak bisa bersaing dengan para tengkulak dan pedagang besar,” tambahnya.

Selain meninjau gudang Bulog tim Komisi IV DPR juga mengunjungi pasar induk Cibitung Kab. Bekasi, Pasar Johar Karawang, gudang Dolog Cimindi dan pasar tradisional Cimahi, serta Rumah Pematangan Hewan (RPH) Ciroyom Bandung Jawa Barat.

Turut serta pada Kunjungan Spesifik kali ini, anggota Komisi IV DPR RI Jafar Nainggolan dan HM. Rosyid Hidayat (F-PD), H. Marzuki Daud dan Siswono Yudho Husodo (F-PG), Djuwarto dan Sudin (F-PDI Perjuangan), H. Zainut Tauhid Sa’adi (F-PPP), dan Budi Heriyadi (F-Gerindra). (Srn) foto: parle



Gudang Bulog beras dan gula di Jakarta



Komisi IV DPR Datangi Pasar Tradisional JABAR

Rombongan Komisi IV DPR RI mendatangi beberapa pasar tradisional di Jawa Barat (Jabar) untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran menjelang Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah, Rabu (24/8)

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron Rabu mengatakan pihaknya mendatangi beberapa pasar tradisional sebagai upaya meyakinkan masyarakat mengenai ketersediaan sejumlah bahan pokok dan pangan menjelang lebaran.

Selain itu, kata dia, juga untuk memantau stabilitas harga sejumlah kebutuhan pokok dan pangan di pasaran.

“Stok beras di Jabar cukup aman hingga empat bulan ke depan, sesuai dengan hasil kunjungan ke beberapa pasar. Harga beras juga umumnya turun antara Rp200-300 per kilogram,” kata Herman.

Dikatakannya, harga beras di pasaran masih cenderung stabil. Karena itu belum perlu dilakukan operasi pasar beras murah untuk mengatasi kenaikan harga beras di pasaran.

Meski demikian, ia berharap pemerintah dapat memperhatikan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok dan pangan menjelang Lebaran. Sebab dikhawatirkan akan terjadi kenaikan harga daging menyusul semakin dekatnya Lebaran.

Selain mendatangi pasar Induk Besar Johar Karawang, rombongan Komisi IV DPR RI itu juga mendatangi Pasar Cibitung, gudang bulog DKI Jakarta, serta mendatangi Rumah Potong Hewan dan pasar ternak, pasar tradisional dan pasar modern di Bandung.

Wakil Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana mengatakan hingga kini Karawang masih tetap memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Karena Karawang merupakan salah satu daerah lumbung padi nasional.

Sebagai daerah sentra pemasok beras, kata dia Karawang mampu memproduksi padi sebesar 1,3 juta ton per tahun. Tetapi Cellica tidak bisa menjamin beras yang beredar di pasaran sekitar Karawang merupakan produk lokal. (nt) foto:parle



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron



DPR Minta Rumah Singgah Berikan Pelatihan Optimal Bagi Anak Jalanan

Komisi VIII DPR meminta para anak jalanan yang berada di “Rumah Singgah Pelita” memanfaatkan waktunya untuk belajar membaca atau belajar ketrampilan seperti menjahit dan lain sebagainya sehingga diharapkan dapat menambah penghasilan mereka dan berdaya guna bagi orang lain.

Pendapat tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Gondo Radityo Gambiro saat Tim Komisi VIII DPR meninjau Rumah Singgah Pelita, di Jl. Kosambi No.12 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Rabu (24/8).

“Anda tidak bisa jadi apa-apa kalau bermalas-malasan, tetapi anda bisa jadi seseorang meskipun anda tidak tinggal disini apabila anda berusaha

keras dan rajin, semoga Rumah Singgah ini bermanfaat bagi kalian dan cita-cita kalian semua bisa tercapai sesuai dengan harapan,” tegas Gondo.

Gondo meminta Pemprov DKI Jakarta mencontoh Pemerintah Cina dalam mengatasi anak jalanan. Pemerintah Cina, jelasnya, membatasi membeludaknya para anak jalanan dengan memberikan pelayanan bagi warga negara yang berdomisili dikelahirannya,

meskipun mereka pindah tempat, hak warganya tetap di daerah asal. “Warga China harus berdomisili di kota kelahirannya. Saat dia pindah kota maka hak-hak warga tersebut tidak serta merta pindah, karena hak mereka tetap di daerah asal,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut patut dikaji oleh Pemprov DKI Jakarta dandijadikan contoh agar tidak sembarang orang bisa masuk Jakarta. “Jika hal tersebut diterapkan di Jakarta maka beban Pemprov DKI Jakarta akan berkurang, karena anak jalanan tersebut merupakan beban daerah asalnya,” paparnya.

Dia mengatakan, sekarang ini pelayanan cenderung tidak adil untuk warga Jakarta asli. Anggaran Pemprov DKI Jakarta tersedot ke warga yang bukan penduduk asli Jakarta. “Kalau mau adil, para pendatang termasuk anak jalanan ini juga menjadi tanggungjawab daerah asalnya,” jelasnya.

Namun demikian, kata Gondo, dirinya mengajak seluruh warga dan pemerintah daerah mendiskusikan dan berdialog bagaimana mencari formula yang tepat sasaran dalam mengatasi anak jalanan. “Praktis, pak walikota juga tidak pusing melaksanakannya, pak camat, pak lurah, dan pak RW/RT juga enak, bila diiringi Undang-Undang, Perda dan sebagainya. “Jangan sampai nanti malah dari luar kota datang karena ada yang menampung itu, terus datang saja dengan seenaknya, itu kan dilema juga,” tambahnya.

Gondo menambahkan, dirinya mengapresiasi tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Pemprov DKI Jakarta dalam menangani anak jalanan. Pemprov DKI Jakarta pun menyatakan sudah berulang kali merazia dan memulangkan PMKS, gepeng maupun anak jalanan ke daerah asalnya. Namun hal ini dinilai Pemprov DKI Jakarta merupakan masalah nasional dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta. (iw)/foto: iw/parle.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Gondo Radityo Gambiro meninjau Rumah Singgah Pelita, Kosambi, Jakarta





Bedug ditabuh bertalu-talu,
berseru mengagungkan
kalimat takbir
kemenangan



**Takbir Telah
Berkumandang**
Hari Kemenangan Telah Tiba, Bersihkan Hati Kembali Fitri
**Keluarga Besar
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia**
Mengucapkan Selamat
idul fitri

1 Syawal 1432 H

Minal Aidin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Bathin



66 Tahun
adalah usia yang sangat dewasa bagi
DPR RI,
mari kita tingkatkan pengabdian kita
kepada bangsa dan negara.

DIRGAHAYU
DPR RI

